



Jurnal Politeknik Caltex Riau
<http://jurnal.pcr.ac.id>

Pengaruh Ukuran Dewan Direksi Terhadap Profitabilitas Perusahaan BUMN Di Indonesia Dengan Kepemilikan Pemerintah Sebagai Variabel Moderating

Suci Nurulita

Politeknik Caltex Riau, email: suci@pcr.ac.id

Abstrak

Tujuan utama dibentuknya dewan direksi adalah untuk memaksimalkan nilai perusahaan dengan terlaksananya pengelolaan secara profesional dan mandiri yang berlandaskan pada nilai moral yang tinggi dan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku. Untuk meningkatkan profitabilitas perusahaan tidak terlepas dari peran serta segenap Dewan Direksi untuk mengembangkan perusahaan kearah kemajuan. Pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan data sekunder yang diperoleh dari Bursa Efek Indonesia yaitu berupa laporan keuangan perusahaan. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh perusahaan BUMN Indonesia yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia dari tahun 2003-2014 sebanyak 25 perusahaan. Sampel penelitian yang digunakan dalam penelitian berjumlah 12 perusahaan dengan menggunakan metode purposive sampling. Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode analisis regresi berganda dengan bantuan software SPSS versi 22. Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara parsial variabel Ukuran Dewan Direksi dan kepemilikan Pemerintah berpengaruh negatif signifikan terhadap profitabilitas perusahaan BUMN di Indonesia. Kepemilikan pemerintah memoderasi hubungan antara Ukuran Dewan Direksi terhadap profitabilitas perusahaan BUMN.

Kata kunci: *Ukuran Dewan Direksi, kepemilikan pemerintah, profitabilitas.*

Abstract

The main purpose of the establishment of Board Size is to maximize the value of the company with the implementation of independent and professional management based on high moral values and compliance with the legislation in force. To achieve profitability the company can not be separated from the participation of all the Board of Directors to develop the company towards progress. The population of this study was all of the 25 State-Owned Enterprises (SOEs) registered in the Indonesian Stock Exchange from 2003-2014 and 12 of them were selected to be the samples for this study through purposive sampling method. The data obtained were multiple linear regression method with SPSS version 22. The results of this study showed that partially the variable of Board Size and Government Ownership had a negative significant influence on profitability of the company. Government ownership moderated the relationship between Board Size and the profitability of the SOEs in Indonesia.

Keywords: *Board Size, government ownership, profitability.*

1. Pendahuluan

Dalam upaya peningkatan kinerja perusahaan di era globalisasi ini perusahaan perlu dituntut untuk melakukan pengawasan dan pemantauan kinerja manajemen yang menjadi jaminan pertanggungjawaban direksi kepada para pemegang saham sesuai dengan peraturan yang berlaku. Untuk itu, peran dewan direksi sangatlah penting dan bertanggungjawab atas perkembangan suatu unit bisnis dan efisiensi kinerja pegawai.

Dibentuknya dewan direksi adalah guna mencapai terwujudnya pengelolaan secara professional, *profitable*, penuh daya saing dan mandiri yang berlandaskan pada nilai moral yang baik dan kepatuhan serta ketertiban terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku. Tujuan ini juga berfungsi untuk menambah nilai perusahaan itu sendiri dan dengan sendirinya akan memperoleh kepercayaan dari berbagai pihak baik eksternal maupun internal perusahaan. Dewan direksi juga harus dapat memastikan terlaksananya tanggung jawab sosial perusahaan terhadap para pemangku kepentingan maupun lingkungannya.

Untuk meningkatkan profitabilitas perusahaan tidak terlepas dari peran serta segenap Dewan Direksi untuk mengembangkan perusahaan kearah kemajuan. Kinerja BUMN secara keseluruhan masih belum memberikan kontribusi yang optimal bagi perekonomian negara. Hal ini tampak dengan masih sedikitnya perusahaan-perusahaan BUMN di Indonesia yang belum *go public* dan perkembangannya masih kalah saing dengan perusahaan-perusahaan asing yang berada di Indonesia sendiri, khususnya di bidang perindustrian dimana seharusnya perusahaan-perusahaan Indonesia menjadi produsen barang-barang yang minimal diperlukan untuk kebutuhan di negeri sendiri dan bukan hanya menggali hasil bumi Indonesia dan mengeksportnya ke negara-negara lain. Dalam hal ini seharusnya perusahaan-perusahaan BUMN mampu menjadi contoh untuk perusahaan-perusahaan lainnya dengan melihat pertumbuhan profitabilitas dan kinerja perusahaan secara terbuka dimana kepemilikan pemerintah sangat berpengaruh dan berperan dalam pengembangan perusahaan serta menjadi nilai tambah yang tidak dimiliki oleh perusahaan-perusahaan privat lainnya.

Bedasarkan uraian latarbelakang tersebut maka tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis pengaruh Ukuran Dewan Direksi terhadap profitabilitas perusahaan BUMN di Indonesia yang diukur dengan *Return on Equity* (ROE) dengan kepemilikan pemerintah sebagai variabel moderating.

2. Tinjauan Pustaka

2.1 Teori Agency

Teori keagenan menyatakan bahwa kinerja perusahaan khususnya profitabilitas dipengaruhi oleh adanya konflik kepentingan antara agen (manajemen) dengan prinsipal (pemilik/ investor) yang timbul ketika setiap pihak berusaha untuk mencapai atau mempertahankan tingkat kemakmuran yang dikehendakinya. Konflik kepentingan antar agen sering disebut sebagai masalah keagenan, dimana adanya pemisahan kepemilikan oleh pihak prinsipal dengan pengendalian oleh agen pada suatu organisasi. Tata kelola yang baik diperlukan untuk melindungi para pemegang saham yang telah memberikan uangnya kepada manajemen perusahaan untuk mengelola dan mengambil keuntungan dari kondisi dimana telah terjadinya pemisahan antara pemilik perusahaan dengan pengelola perusahaan. Para pemegang saham akan memilih *Board of Director's* untuk menampung aspirasinya akan tetapi pihak manajemen dapat mempengaruhi proses ini untuk kepentingan pribadinya, Lubis [7].

2.2 Profitabilitas

Profitabilitas adalah kemampuan perusahaan untuk memperoleh laba dalam periode tertentu, Riyanto [8]. Tingkat profitabilitas perusahaan merupakan hasil akhir dari berbagai kebijakan dan keputusan yang dilakukan manajer perusahaan. Profitabilitas perusahaan dapat diketahui dengan cara membandingkan laba yang diperoleh dalam suatu periode dengan jumlah asset, jumlah modal atau jumlah investasi perusahaan tersebut.

Penelitian ini menggunakan rasio keuangan untuk mengukur profitabilitas perusahaan yaitu *Return on Equity* (ROE). ROE dipilih karena salah satu tujuan tata kelola perusahaan yang baik itu sendiri adalah untuk melindungi para pemegang saham yang telah memberikan uangnya berupa modal kepada manajemen perusahaan untuk diolah menjadi keuntungan.

Return on Equity merupakan suatu pengukuran dari penghasilan/*Income* yang tersedia bagi para pemilik perusahaan (baik pemegang saham biasa maupun pemegang saham preferen) atas modal yang mereka investasikan didalam perusahaan, Syamsuddin [11]. Secara umum tentu saja semakin tinggi *return* saham/penghasilan yang diperoleh semakin baik kedudukan pemilik perusahaan. Rasio ini banyak diamati oleh para pemegang saham (baik pemegang saham pendiri maupun pemegang saham baru) serta para investor di pasar modal yang ingin membeli saham yang bersangkutan.

2.3 Ukuran Dewan Direksi

Menurut Chtourou, Jean dan Lucie [2] ukuran dewan direksi yang lebih besar dapat memonitor proses pelaporan keuangan serta mengawasi kinerja manajerial dengan lebih efektif dibandingkan ukuran dewan direksi yang lebih kecil. Besarnya ukuran dewan direksi yang ideal menurut Jensen [4] adalah tujuh (7) orang sebab jika jumlah dewan direksi yang terlalu besar yang lebih dari tujuh orang akan memberikan kesempatan kepada manajemen untuk melakukan manipulasi data. Dewan direksi menetapkan suatu sistem pengawasan internal yang efektif dalam mengelola dan terintegrasi secara sistematis. Tujuannya adalah untuk mencapai kepastian yang berkenaan dengan kebenaran informasi keuangan, efektivitas dan efisiensi proses pengelolaan perusahaan, dan kepatuhan pada peraturan dan perundang-undangan yang terkait serta mengamankan investasi dan asset perusahaan sehingga memungkinkan terjadinya peningkatan kinerja perusahaan tanpa terjadinya kecurangan yang dapat merugikan berbagai pihak.

2.4 Kepemilikan Pemerintah

Kepemilikan Pemerintah adalah persentase kepemilikan saham yang dimiliki oleh pemerintah sebagai agen monitoring eksternal disebabkan oleh besarnya investasinya pada pasar modal, Yonedi & Sari [12]. Kepemilikan oleh pemerintah menurut Shleifer dan Vishny dalam Yonedi & Sari [12] yang berarti kepemilikan tersebut terkonsentrasi, justru akan mendorong pengendalian atas perusahaan untuk melakukan ekspropriasi atau dominasi terhadap pemegang saham minoritas. Kepemilikan pemerintah memiliki keuntungan dalam pelayanan sebagai institusional alternatif untuk regulasi. Ini menunjukkan pemerintah sebagai pemangku kepentingan mempunyai hak dalam pengambilan keputusan yang akan mempengaruhi kebijakan dalam tata kelola perusahaan. Tujuan jenis kepemilikan ini tidak hanya memaksimalkan nilai pemegang saham namun juga bertujuan untuk menambah nilai perusahaan dan pengembalian modal berupa keuntungan kepada Pemerintah yang nantinya akan bermanfaat untuk perkembangan perekonomian nasional. .

3. Metode Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian kuantitatif eksplanasi. Penelitian ini adalah untuk menguji dan menganalisis pengaruh Ukuran Dewan Direksi terhadap profitabilitas yang diukur dengan *Return On Equity* (ROE) pada perusahaan BUMN di Indonesia dengan kepemilikan pemerintah sebagai variabel moderating.

Populasi pada penelitian ini adalah seluruh perusahaan BUMN di Indonesia yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia sampai dengan tahun 2014 yaitu berjumlah 25 perusahaan dengan periode 12 tahun pengamatan yaitu dari tahun 2003 sampai dengan tahun 2014. Sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah 12 perusahaan BUMN dengan menggunakan metode *purposive sampling* yaitu dengan kriteria perusahaan BUMN yang terlisting di BEI harus sudah berdiri sejak tahun 2003 dan data-data yang dibutuhkan lengkap. Pengumpulan data

dilakukan dengan menggunakan data sekunder yang diperoleh dari Bursa Efek Indonesia yaitu berupa laporan keuangan perusahaan.

3.1.1 Metode Analisis Data

Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan metode analisis regresi berganda dengan menggunakan bantuan SPSS versi 22. Berikut ini tabel definisi operasional variabel beserta indikator yang digunakan.

Tabel 1. Definisi Operasional Variabel

VARIABEL	KONSEP	INDIKATOR	SKALA
Ukuran Dewan Direksi (X₁)	Dewan direksi merupakan dewan yang bertanggungjawab dalam mengelola perusahaan.	Jumlah Dewan Direksi	Nominal
Variabel Moderating : Kepemilikan Pemerintah (X₂)	Persentase kepemilikan saham yang dimiliki oleh Pemerintah sebagai agen monitoring eksternal disebabkan oleh besarnya investasinya pada pasar modal.	Kepemilikan Pemerintah = $\frac{\text{Jlh.Saham Pemerintah}}{\text{Jumlah Saham Beredar}} \times 100$	Rasio
Profitabilitas - ROE (Y)	ROE adalah rasio yang digunakan untuk mengukur tingkat keuntungan bersih yang diperoleh oleh perusahaan atas modal yang diinvestasikan.	ROE = $\frac{\text{Lb.Bersih Tahun berjalan}}{\text{Rata-Rata Total Ekuitas}} \times 100$	Rasio

3.1.2 Model Regresi

Model regresi yang digunakan untuk menguji hipotesis sebagai berikut:

$$Y = \beta_0 + \beta_1 X_1 + \varepsilon \dots\dots\dots(1)$$

$$Y = \beta_0 + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + \beta_3 [X_1 X_2] + \varepsilon \dots\dots\dots(2)$$

Keterangan:

Y = Return on Equity (ROE)

X₁ = Ukuran Dewan Direksi (UDD)

X₂ = Kepemilikan Pemerintah (KP)

[X₁.X₂] = Moderating Kepemilikan Pemerintah terhadap Profitabilitas (Moderate)

β₀ = konstanta

β₁ = koefisien regresi

ε = koefisien error

Hipotesis yang akan diuji adalah :

1. Ukuran Dewan Direksi berpengaruh signifikan terhadap profitabilitas yang diukur dengan ROE pada perusahaan BUMN di Indonesia.
2. Kepemilikan Pemerintah berpengaruh signifikan terhadap profitabilitas yang diukur dengan ROE pada perusahaan BUMN di Indonesia.
3. Kepemilikan Pemerintah memoderasi Ukuran Dewan Direksi terhadap Profitabilitas diukur dengan ROE pada perusahaan BUMN di Indonesia.

4. Hasil dan Pembahasan

4.1.1. Analisis Statistik Deskriptif

Berikut ini disajikan statistik deskriptif data penelitian pada Perusahaan BUMN dari 106 observasi dari tahun 2003 hingga 2014.

Tabel 2 : Descriptive Statistics

	N	Minimum	Maximum	Mean	Std.Deviation
Ukuran Dewan Direksi	106	5,00	9,00	6,1415	1,27570
Kepemilikan Pemerintah	106	14,69	80,66	62,426	10,46109
Profitabilitas (ROE)	106	6,07	58,50	22,410	11,50967
Valid N (listwise)	106				

Sumber: Output SPSS, data diolah, 2015

Berdasarkan hasil uji statistik deskriptif yang terlihat pada Tabel 2 dapat dijabarkan bahwa dari 106 sampel penelitian dapat dilihat bahwa variabel Ukuran Dewan Direksi memiliki rata-rata sebanyak 6 orang. Dengan minimum 5 orang anggota yaitu seperti pada perusahaan PT.Kimia Farma (Persero) Tbk, dan maksimum 9 orang anggota seperti pada perusahaan PT.Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk yang sampai dengan tahun 2014 sudah mencapai 10 orang dewan direksi.

Pada variabel Kepemilikan Pemerintah memiliki nilai rata-rata sebesar 62,42% dengan kisaran antara 14,69% hingga 80,66%. Kepemilikan pemerintah terkecil terdapat pada perusahaan PT.Indosat, Tbk yang sebelumnya jumlah kepemilikannya pada tahun 2006 sebesar 77,66% namun turun hingga sekarang menjadi 14,69%. Kepemilikan Pemerintah terbanyak terdapat pada perusahaan PT. Indofarma (Persero) Tbk dan Kimia Farma (Persero) Tbk.

Variabel ROE memiliki rata-rata sebesar 22,41% dengan kisaran antara 6,07% hingga 58,5% dan standar deviasi atau ukuran penyebaran datanya sebesar 11,5%. Tampak bahwa pada umumnya perusahaan BUMN yang terlisting di BEI mempunyai ROE sebesar 22,41% yang diperoleh dari perbandingan laba bersih tahun berjalan dan total ekuitas. Hal ini berarti setiap Rp 1 yang dimodalkan perusahaan mampu menghasilkan pengembalian sebesar Rp 22,41.

4.1.2. Analisis Regresi

Tabel 3: Hasil Uji T Statistik Coefficients^a

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	T	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
1 (Constant)	124,431	43,204		2,880	,005
UDD	-17,687	7,090	-1,960	-2,495	,014
KP	-1,905	,690	-1,731	-2,759	,007
Moderate	,329	,114	2,719	2,883	,005

Sumber: Output SPSS, data diolah, 2015

Berdasarkan tabel 3 diperoleh persamaan regresi :

$$\text{ROE} = 124,431 - 17,687X_1 \dots\dots\dots(1)$$

$$\text{ROE} = 124,431 - 17,687X_1 - 1,905.X_2 + 0,329 [X_1.X_2] \dots\dots\dots (2)$$

Besarnya koefisien konstanta adalah 124,431 dengan nilai positif, ini menunjukkan bahwa apabila semua variabel bebas adalah nol maka besarnya ROE adalah 124,431. Koefisien variabel Ukuran Dewan Direksi (UDD) adalah sebesar -17,687 (dalam persen), ini menunjukkan apabila terjadi setiap penurunan 1% maka variabel UDD akan meningkatkan profitabilitas (ROE) perusahaan sebesar 17,68%. Koefisien regresi untuk variable Kepemilikan

Pemerintah (KP) adalah sebesar -1.905 (dalam persentase), artinya apabila terjadi setiap pengurangan 1% maka variabel KP akan meningkatkan profitabilitas (ROE) perusahaan sebesar 1,9%.

Dari Tabel 3 dapat dilihat hasil uji T statistik yaitu apabila nilai probabilitas t hitung (output SPSS yang ditunjukkan pada kolom sig.) lebih kecil dari tingkat kesalahan (α) 0,05 maka dapat dikatakan bahwa variabel bebas dari t hitung tersebut berpengaruh signifikan terhadap variabel terikatnya, sedangkan apabila nilai probabilitas t hitung lebih besar dari tingkat kesalahan 0,05 maka dapat dikatakan bahwa variabel bebas tidak berpengaruh signifikan terhadap variabel terikatnya.

Nilai probabilitas T hitung dari variabel bebas UDD sebesar 0,014 yang lebih kecil dari 0,05 sehingga variabel bebas UDD secara parsial berpengaruh signifikan terhadap variabel terikat ROE pada α 5% atau dengan kata lain, Ukuran Dewan Direksi berpengaruh negatif signifikan terhadap ROE pada taraf keyakinan 95%. Hal ini disebabkan karena adanya kontrol yang mereka miliki dan mempengaruhi kemampuan mereka dalam memonitor proses pelaporan keuangan serta memudahkan pengawasan dalam setiap bidang struktur dalam suatu perusahaan. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian Setiawan, Bernik dan Sondari [9] yang menunjukkan bahwa proporsi dewan direksi mempengaruhi profit secara signifikan. Besarnya ukuran dewan direksi yang ideal menurut Jensen [4] adalah tujuh (7) orang sebab jika jumlah dewan direksi yang terlalu besar akan memberikan kesempatan kepada manajemen untuk melakukan manipulasi data. Semakin besarnya anggota dewan direksi dapat mempengaruhi kebijakan dalam pengambilan keputusan yang berkenaan dengan kebenaran informasi keuangan dikarenakan adanya berbagai kepentingan tertentu, mempengaruhi efektivitas dan efisiensi proses pengelolaan perusahaan, sehingga berpengaruh pada kinerja perusahaan khususnya pada profitabilitas perusahaan.

Sama halnya dengan pengaruh variabel bebas Kepemilikan Pemerintah terhadap variabel terikat ROE, karena nilai probabilitas T hitung sebesar 0,007 yang lebih kecil dari 0,05 sehingga dapat dikatakan bahwa variabel bebas Kepemilikan Pemerintah berpengaruh negatif signifikan terhadap variabel terikat ROE pada α 5%. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian Yonnedi & Sari [12] adanya pengaruh yang negatif signifikan kepemilikan pemerintah terhadap profitabilitas (ROA dan ROE) di perusahaan BUMN di Indonesia. Kepemilikan dalam BUMN mempunyai artian khusus bahwa pemiliknya tidak dapat mengontrol secara langsung perusahaannya. Pemilik hanya diwakili oleh pejabat yang ditunjuk. Dominasi kepemilikan pemerintah pada BUMN dapat mengganggu penegakkan prinsip-prinsip tata kelola yang baik dan dapat mengakibatkan pengambilan keputusan bisnis tidak *profitable*. Maksud dilakukannya privatisasi BUMN antara lain untuk memperluas kepemilikan masyarakat atas persero dan menciptakan struktur keuangan yang kuat/baik (UU BUMN No 19, pasal 74, 2003). Struktur keuangan yang kuat dapat pula ditinjau dari struktur kepemilikan, proporsi kepemilikan yang lebih besar dari proporsi hutang, akan mengakibatkan rasio hutang atas ekuitas menjadi relatif rendah. Perusahaan yang memiliki rasio hutang atas ekuitas relatif rendah akan mengakibatkan struktur permodalannya relatif baik. Adapun perluasan kepemilikan masyarakat, merupakan strategi pendanaan tidak melalui hutang, tetapi melalui transfer kepemilikan kepada masyarakat. Transfer kepemilikan tersebut akan mengurangi dominasi kepemilikan pemerintah, akibat adanya kepemilikan masyarakat ada pengendali perusahaan selain pemerintah dan manajemen BUMN, sehingga diharapkan privatisasi BUMN dapat menciptakan efisiensi dan berdaya saing, Avianti [1]. Namun demikian, realita yang ada bahwa kepemilikan pemerintah terhadap privatisasi BUMN di pasar modal masih relatif besar dengan rata-rata kepemilikan pemerintah sebesar 62,43%.

Tabel 4 : Hasil Uji Statistik F

ANOVA ^a						
Model		Sum of Squares	Df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	2119,159	3	706,386	6,111	,001 ^b
	Residual	11790,453	102	115,593		
	Total	13909,612	105			

a. Dependent Variable: ROE
b. Predictors: (Constant), Moderate, KP, UDD

Sumber: Output SPSS, data diolah, 2015

Pada uji F statistik apabila nilai probabilitas F hitung (output SPSS ditunjukkan pada kolom sig.) lebih kecil dari tingkat kesalahan/error (alpha) 0,05 (yang telah ditentukan) maka dapat dikatakan bahwa model regresi yang diestimasi layak, sedangkan apabila nilai probabilitas F hitung lebih besar dari tingkat kesalahan 0,05 maka dapat dikatakan bahwa model regresi yang diestimasi tidak layak. Dari hasil pengujian dapat dilihat pada tabel 4 tersebut bahwa F hitung sebesar 0,001 lebih kecil dari tingkat kesalahan alpha 0,05 maka dapat dikatakan bahwa model regresi layak. Hal ini berarti secara simultan pengujian variabel Ukuran Dewan Direksi dan Kepemilikan Pemerintah berpengaruh signifikan terhadap profitabilitas yang diukur dengan ROE.

4.1.3. Analisis Korelasi

Output hasil regresi pertama dapat dilihat pada tabel 5 berikut :

Tabel 5 : Hasil analisis korelasi tanpa moderating

Model Summary				
Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	,283 ^a	,080	,071	11,09297

Sumber: Output SPSS, data diolah, 2015

Pada tabel *model summary*, nilai koefisiensi korelasi (R) sebesar 0,283 yang berarti bahwa korelasi atau hubungan antara ROE dengan variabel bebasnya (Ukuran Dewan Direksi) lemah karena berada di bawah 0,5. Hal tersebut menjelaskan bahwa kemampuan variabel bebas dalam menjelaskan varians variabel terikat relatif rendah. Angka *adjusted R square* atau koefisiensi determinasi adalah 0,071. Hal ini berarti hanya 7,1% variasi atau perubahan dalam ROE dapat dijelaskan oleh variasi dari Ukuran Dewan Direksi. Kemudian output hasil regresi kedua sebagai berikut:

Tabel 6 : Hasil analisis korelasi dengan moderating

Model Summary				
Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	,390 ^a	,152	,127	10,75140

Sumber: Output SPSS, data diolah, 2015

Hasil analisis korelasi pada tabel 6 *model summary* dapat dilihat bahwa variabel moderating yang merupakan perkalian antara skor variabel Ukuran Dewan Direksi dan skor variabel kepemilikan pemerintah terhadap variabel profitabilitas (ROE) memiliki nilai *R Square* sebesar 0,152 hal ini menunjukkan setelah ada persamaan regresi yang kedua nilai R^2 meningkat menjadi 15,2%. Dengan melihat hasil tersebut maka dapat disimpulkan bahwa dengan adanya Kepemilikan Pemerintah (Variabel moderating) akan dapat memperkuat hubungan Ukuran Dewan Direksi terhadap profitabilitas perusahaan BUMN di Indonesia. Sedangkan untuk

adjusted R Square atau koefisiensi determinasi adalah 0,127. Hal ini berarti 12,7% variasi atau perubahan dalam ROE dapat dijelaskan oleh variasi dari Ukuran Dewan Direksi dan kepemilikan pemerintah, sedangkan sisanya (87,3%) dijelaskan oleh variabel lain.

Kepemilikan pemerintah merupakan jumlah saham yang dimiliki oleh Negara pada suatu perusahaan. Ini menunjukkan Pemerintah sebagai pemegang saham dan pemangku kepentingan mempunyai hak dalam pengambilan keputusan yang akan mempengaruhi kebijakan dalam tata kelola perusahaan yang dapat terlihat pada tingkatan profitabilitas perusahaan.

5. Kesimpulan dan Saran

5.1.1 Kesimpulan

1. Variabel Ukuran Dewan Direksi berpengaruh negatif signifikan terhadap profitabilitas yang diukur dengan ROE pada perusahaan BUMN yang terlisting di Bursa Efek Indonesia periode pengamatan tahun 2003 hingga tahun 2014.
2. Variabel kepemilikan Pemerintah berpengaruh negatif signifikan terhadap profitabilitas yang diukur dengan ROE pada perusahaan BUMN yang terlisting di Bursa Efek Indonesia periode pengamatan tahun 2003 hingga tahun 2014.
3. Kepemilikan pemerintah memoderasi Ukuran Dewan Direksi terhadap profitabilitas (ROE) perusahaan BUMN yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode pengamatan tahun 2003 hingga tahun 2012.

5.1.2 Saran

1. Kepada peneliti yang ingin melakukan penelitian lanjutan disarankan bisa meneliti seluruh perusahaan BUMN yang ada di Indonesia atau menambahkan sampel dari perusahaan konvensional lainnya pada bidang/ sektor bisnis sejenis sehingga dengan bertambahnya sampel penelitian akan lebih mencerminkan gambaran dari keseluruhan perusahaan BUMN yang tersebar di seluruh Indonesia dan dapat membandingkan antara perusahaan BUMN dengan perusahaan konvensional lainnya.
2. Peneliti selanjutnya disarankan agar dapat menambah jumlah variabel independen lainnya atau mengambil variabel independen yang berbeda, seperti macam-macam struktur kepemilikan dan berbagai komposisi dewan perusahaan sehingga dengan menambah variabel akan menambah temuan baru yang lebih baik lagi yang diduga dapat mempengaruhi profitabilitas perusahaan.
3. Peneliti selanjutnya disarankan agar dapat menambah rasio lain dalam mengukur profitabilitas seperti rasio dalam kaitannya dengan investasi yaitu *Return On Investment* (ROI) atau penjualan yang menggunakan rasio margin laba kotor atau rasio margin laba bersih sehingga dengan bertambahnya rasio pengukuran dapat mencerminkan profitabilitas perusahaan dalam berbagai segi.

Daftar Pustaka

- [1] Avianti,Ilya.“*Privatisasi BUMN dan Penegakan Good Corporate Governance dan Kinerja BUMN*”. Jurnal KINERJA, Volume 10, No.1, Th. 2006: Hal. 57-65.2006.
- [2] Chtourou,S.M, Jean Bedard, and Courteau Lucie, “*Corporate Governance and Earnings Management*.”, <http://papers.ssrn.com/>.(18-5-2010), 2001.
- [3] Ghazali,Imam.” *Aplikasi analisis multivariate dengan program SPSS edisi 3*”, Semarang : Badan Penelitian Universitas Diponegoro, 2005.
- [4] Jensen,M.C.”*The Modern of Industrial Revolution, Exit and the Failure of Internal Control Systems*”, <http://papers.ssrn.com/> (18-5-2010). 1993.
- [5] Juanda, Ahmad, “*Analisis Konseptual Good Corporate Governance*”, Naskah Publikasi Penelitian Dasar Keilmuan, 2000.

- [6] Keputusan Menteri BUMN Indonesia No.KEP-117/M-MBU/2002.
- [7] Lubis, Ade Fatma, "*Pasar Modal*", Jakarta: Lembaga Penerbit Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia, 2008.
- [8] Riyanto,Bambang, "*Dasar-Dasar Pembelanjaan Perusahaan*". Yogyakarta: BPFE.2001.
- [9] Setiawan M, Merita Bernik, Mery C. Sondari, "*Pengaruh Struktur Kepemilikan, Karakteristik Perusahaan, Dan Karakteristik Tata Kelola Korporasi Terhadap Kinerja Perusahaan Studi Kasus Pada Perusahaan Yang Terdaftar Di Bursa Efek Jakarta*", Lembaga Penelitian Fakultas Ekonomi Universitas Padjadjaran. 2006.
- [10] Surya, Indra. Ivan Yustiavandana, "*Penerapan Good Corporate Governance : Mengesampingkan hak-hak istimewa demi kelangsungan usaha*". Jakarta : Prenada Media Group,2008.
- [11] Syamsuddin, Lukman. "*Manajemen Keuangan Perusahaan: Konsep Aplikasi dalam Perencanaan, Pengawasan, & Pengambilan Keputusan*". Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2009.
- [12] Yonnedi, Efa. Dewi Yulia Sari. "*Impact of Corporate Governance Mechanisms on Firm Performance; Evidence from Indonesia's State – Owned Enterprises (SOEs)*". SNA 12. 2009.